

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 12 Maret 2020 mengumumkan COVID-19 sebagai pandemic global (WHO, 2020). Hingga saat ini penyebaran COVID-19 secara global masih juga belum berakhir. Pada kondisi saat ini, COVID-19 bukan lagi suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja (Sumarni, 2020). Untuk memutus rantai penularan penyebaran virus COVID-19 dilakukan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, diantaranya yaitu dengan membatasi aktifitas di luar rumah, kegiatan belajar mengajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan kegiatan ibadah dilakukan dari rumah. Selain memberi dampak pada aspek sosial masyarakat, pandemic COVID-19 juga memberi dampak pada beberapa sektor lainnya yaitu ekonomi, pariwisata, dan investasi (Pakpahan, 2020).

Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia. Dalam kesehariannya, manusia selalu bersinggungan dengan kegiatan ekonomi. Keberadaan ekonomi ini yang akhirnya membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Hanoatubun, 2020). Namun, ditengah masa pandemic COVID-19 ruang gerak masyarakat sangat terbatas. Pembatasan aktivitas masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk memutus penyebaran rantai virus COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Akibatnya, hampir jutaan orang menjadi korban

Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK) dan harus kehilangan pekerjaannya (Mardiyah & Nurwati, 2020). Gelombang PHK menjadi ancaman baru dalam dunia bisnis. Berdasarkan pada Data Kementrian Ketenagakerjaan pada April 2020 meencatat jumlah pekerja yang terkena dampak pandemic COVID-19 dengan total 2.084.593 pekerja dari sektor formal dan informal yang berasal dari 116.370 perusahaan (Biro Humas Kemnaker, 2020).

Dampak pandemic COVID-19 juga dirasakan pada sektor pariwisata. Pariwisata di Indonesia mengalami penurunan, hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia meberlakukan larangan perjalanan ke luar maupun ke dalam negri (Sumarni, 2020). Larangan ini membuat beberapa maskapai harus membatalkan penerbangannya, meskipun masih terdapat beberapa maskapai yang tetap beroperasi namun dengan jumlah penumpang yang hanya 50% saja dari kapasitas pesawat. Beberapa sector penunjang pariwisata seperti hotel, restaurant, maupun pengusaha ratalil dan UMKM juga terpengaruh karena adanya pandemic COVID-19, bahkan okupansi hotel mengalami penurunan mencapai 40% dan berdampak pada keberlangsungan bisnis hotel (Hanoatubun, 2020).

Selain berdampak pada perusahaan-perusahaan besar, pandemic COVID-19 yang terjadi juga memberi dampak pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal keberadaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan membantu meningkatkan pendapatan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagai dasar dalam mendirikan BUMDes menyatakan bahwa “BUMDes merupakan

suatu badan usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)”. Dikutip dari [pesawarankab.go.id](http://pesawarankab.go.id) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengatakan bahwa selama masa pandemic COVID-19 ini jumlah BUMDes yang masih aktif dalam melakukan transaksi ekonomi hanya tinggal 10.026 BUMDes dari 37.000 BUMDes yang aktif dalam menjalankan usaha dan transaksi ekonomi sebelum pandemic COVID-19.

Salah satu BUMDes yang terdampak akibat pandemic COVID-19 di Kabupaten Sleman adalah BUMDes Tridadi Makmur. BUMDes Tridadi Makmur sempat merumahkan beberapa pegawainya karena tidak ada pemasukan yang signifikan dikarenakan harus menutup salah satu unit usahanya yaitu Puri Mataram Resto & Wahana Wisata selama masa pandemic. Sehingga 80% karyawan yang berasal dari Desa Tridadi harus kehilangan mata pecariannya sehari-hari (Dinnata, 2020). Selain itu menurut pengelola BUMDes Tridadi Makmur omset yang mereka hasilkan selama masa pandemic COVID-19 juga terjadi penurunan yang signifikan. Dikutip dari laman [Harianjogja.com](http://Harianjogja.com) kerugian yang dialami BUMDes Tridadi Makmur sekitar Rp. 2 Miliar. Pada tahun 2019 saat libur lebaran, BUMDes Tridadi Makmur mampu meraup keuntungan hingga Rp. 1 Miliar, namun libur lebaran tahun 2020 keuntungan yang diperoleh hanya Rp. 13 Juta saja.

Sementara itu di Kabupaten Kulonprogo juga terdapat BUMDes yang merasakan dampak pandemic COVID-19 yaitu BUMDes Binangun Jati

Unggul. Unit usaha jasa keuangan BUMDes Binangun Jati Unggul mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pandemic COVID-19. Banyak nasabah yang tidak dapat membayar bunga sehingga menimbulkan kerugian. Hal ini membuat BUMDes Binangun Jati Unggul memberikan keringanan kepada nasabah agar membayar pokok pinjaman saja tanpa bunga.

Perkembangan dan kemajuan BUMDes tidak lepas dari dukungan pemerintah desa sebagai pemilik BUMDes. Pemerintah desa ikut andil dalam pengembangan BUMDes karena sejatinya kepemilikan BUMDes adalah milik pemerintah desa dan kepemilikan modalnya sebagian besar berasal dari desa. Penyertaan modal BUMDes berasal dari Dana Desa, sehingga kebijakan pemerintah desa dalam alokasi dana desa untuk pengembangan BUMDes dapat mempengaruhi sejauh mana kemajuan BUMDes (Mutolib et al., 2019). Muzanahzain, (2018) menyebutkan bahwa dukungan modal dari pemerintah sangat diperlukan dalam mengembangkan BUMDes Amarta, namun selain dukungan modal, dukungan secara moral juga perlu dilakukan.

Pemerintah desa saat ini sedang fokus dalam menanggulangi pandemic COVID-19 agar dapat terkendali. Dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat difokuskan dalam menanggulangi pandemic COVID-19 saat ini, dengan membelanjakan beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh tenaga medis dan memberikan fasilitas cuci tangan disetiap tempat umum. Namun BUMDes saat ini juga memerlukan dukungan dari pemerintah desa. BUMDes pastinya juga memerlukan dana agar unit usahanya saat ini dapat tetap bertahan di masa pandemic COVID-19.

Selain itu kesadaran dan partisipasi masyarakat di masa pandemic COVID-19 sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan dan unit usaha yang di buat oleh BUMDes sehingga program kegiatan BUMDes dapat terealisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tiballa, (2017) partisipasi masyarakat menjadi modal utama dalam mencapai sasaran dari program kegiatan BUMDes. Keberhasilan dari pelaksanaan suatu program kegiatan BUMDes tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam mengembangkan program kegiatan BUMDes namun juga dari upaya mewujudkan kemampuan masyarakat agar berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan BUMDes.

Kerjasama antara masyarakat di tengah masa pandemic COVID-19 tentunya akan memberikan dampak yang baik dalam menjalankan suatu program atau kegiatan. Sesuai dengan Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat.”*

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia hendaknya saling tolong-menolong dengan sesama dalam melakukan kebaikan. Peran aktif masyarakat desa dalam mengelola program kegiatan

usaha BUMDes dapat menjadi tolak ukur atas keberhasilan BUMDes. Tiballa, (2017) mengenai partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah dilakukan namun belum optimal. Di masa pandemic COVID-19 saat ini, pengelola BUMDes harus melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan dan keputusan yang diambil. Hal ini karena BUMDes dibentuk untuk dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga perencanaan dan keputusan yang dibuat diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat. Menurut Uphoff NT; Cohen JM; Goldsmith AA., (1979) terdapat empat bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam mengambil keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program, partisipasi dalam menikmati hasil dan partisipasi dalam penelitian atau evaluasi.

Dalam menjalankan suatu badan usaha manajemen risiko menjadi salah satu elemen penting karena semakin berkembangnya suatu usaha maka tingkat risiko yang dihadapi akan semakin lebih tinggi. Risiko yang dihadapi oleh suatu badan usaha dapat mengakibatkan kehancuran bagi badan usaha itu sendiri. Oleh karena itu, risiko sangat perlu untuk dikelola. Menurut Putra et al., (2018) manajemen risiko organisasi bertujuan untuk menciptakan system atau mekanisme dalam organisasi sehingga risiko yang dapat merugikan bisa diantisipasi dan dikelola untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan.

Pandemic COVID-19 ini menjadi sebuah risiko bisnis dalam menjalankan suatu usaha. Djohanputro, (2008), risiko bisnis yang terjadi di suatu perusahaan atau organisasi merupakan suatu bentuk ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau organisasi. Apabila risiko yang terjadi tidak di manajemen dengan baik, maka dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau organisasi (Rachmania & Purwanggono, 2017). Begitupula yang tengah dihadapi BUMDes Tridadi Makmur dan BUMDes Binangun Jati Unggul, apabila pengelola BUMDes tidak dapat mengendalikan risiko saat ini maka akan menimbulkan kerugian bagi unit usaha yang dijalankan. Manajemen risiko perlu dilakukan untuk mengetahui, menganalisis dan mengendalikan risiko yang terjadi dalam setiap proses bisnis dan bertujuan untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi yang lebih baik (Pandji. 2004).

Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini berjudul **“Partisipasi Masyarakat, Dukungan Pemerintah Desa, Proses Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Keberlangsungan BUMDes Sebelum dan Saat Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada BUMDes Tridadi Makmur dan BUMDes Binangun Jati Unggul)**. Penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap BUMDes telah dilakukan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Tiballa, (2017), Pratiwi et al., (2019). Namun untuk penelitian dengan konteks COVID-19 belum pernah dilakukan karena pandemic COVID-19 terjadi belum lama ini. Penelitian ini menambahkan variabel dukungan pemerintah desa dan proses manajemen risiko yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini

bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah desa terhadap BUMDes, dan proses manajemen risiko yang diterapkan sebelum dan saat adanya pandemic COVID-19 pada BUMDes Tridadi Makmur dan BUMDes Binangun Jati Unggul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes Tridadi Makmur dan BUMDes Binangun Jati Unggul sebelum dan saat adanya pandemic COVID-19?
2. Bagaimana dukungan pemerintah desa dalam mengelola BUMDes Tridadi Makmur dan BUMDes Binangun Jati Unggul sebelum dan saat adanya pandemic COVID-19?
3. Bagaimana pengelola BUMDes Tridadi Makmur dan BUMDes Binangun Jati Unggul melakukan manajemen risiko sebelum dan saat pandemic COVID-19 dalam menjalankan usaha dan langkah apa yang dilakukan untuk mempertahankan unit usaha pada masa pandemic COVID-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk:

1. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes Tridadi Makmur dan BUMDes Binangun Jati Unggul sebelum dan saat adanya pandemic COVID-19.



2. Mengetahui dukungan pemerintah desa dalam mengelola BUMDes Tridadi Makmur dan BUMDes Binangun Jati Unggul sebelum dan saat adanya pandemic COVID-19.
3. Mengetahui bagaimana pengelola BUMDes Tridadi Makmur dan BUMDes Binangun Jati Unggul melakukan manajemen risiko sebelum dan saat pandemic COVID-19 dalam menjalankan usaha dan langkah yang dilakukan untuk mempertahankan unit usaha pada masa pandemic COVID-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi disiplin ilmu yang sama serta diharapkan dapat menjadi referensi peneliti-peneliti selanjutnya. Hal ini berhubungan dengan masih terbatasnya penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu penelitian ini berimplikasi terhadap pengembangan teori stakeholders dan stewardship.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pengelola dalam melakukan manajemen risiko selama masa pandemic COVID-19 untuk mempertahankan BUMDes Tridadi Makmur dan BUMDes Binangun Jati Unggul.